

## **PENGARUH OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TETAP MILIK PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH DI KOTA KUPANG**

**Frederika Rambu Pekuwali<sup>1\*</sup>, Thobias E. D Tomasowa<sup>2</sup>, dan Jandri P.Z Ratukadja<sup>3</sup>**  
<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang  
<sup>\*</sup>E-mail: FrederikaPekuwali@gmail.com

### **Abstract**

*This study aims to determine the effect of optimizing the use of fixed assets owned by local governments in increasing local retribution receipts in Kupang City. The purpose of this study was to determine the effect of optimizing the use of fixed assets belonging to the region in increasing the local retribution revenue in Kupang City. The research method used to determine the extent to which optimization of the management of fixed assets (land) belonging to the region in increasing the revenue of the Regional Retribution in Kupang City. Data analysis in this study used descriptive analysis and quantitative analysis with simple linear regression models and statistical tests using SPSS 20 software. in Kupang city not all utilization methods are implemented. The utilization method used is only rent, cooperation in the use and build-up to deliver and there is a significant relationship between the use of assets and the receipt of local user fees, which means that if the utilization of land assets increases, the revenue from local fees will also increase even though it has a very small contribution.*

**Keywords:** Asset Utilization; Regional Retribution Receipt.

### **PENDAHULUAN**

Pemerintahan Negara Republik Indonesia menerapkan sistem desentralisasi. Desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi yang daerah miliki dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Pemerintah daerah menjadi kunci utama dalam menggerakkan roda pemerintahan pada era ini. Pemerintah daerah mendapatkan keleluasaan, wewenang dan hak untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Pemerintah berhak untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai dengan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan sumber-sumber penerimaan yang cukup, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Umumnya PAD setiap daerah masih relatif kecil, hal ini disebabkan karena belum optimal, efisiensi, efektifnya penerapan prinsip penghematan. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya meningkatkan PAD khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang bisa diandalkan karena setiap tahunnya mampu memberikan sumbangan yang relatif besar bagi penerimaan daerah. Salah satu kontribusi pada pendapatan retribusi yaitu retribusi pemakaian daerah. Retribusi pemakaian daerah yaitu berupa tanah yang dipakai oleh masyarakat untuk membangun gedung atau bangunan baik untuk tempat tinggal maupun bisnis. Pemerintah daerah Kota Kupang memberikan wewenang kepada BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk mengelola retribusi pemakaian kekayaan daerah secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta upaya peningkatan terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan retribusi yang optimal diharapkan mampu mewujudkan

otonomi daerah yang baik serta pembangunan daerah yang merata sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Keberadaan aset daerah sangat mempengaruhi bagi kelancaran roda pemerintahan. Oleh karena itu, sistem pengendalian atas pengelolaan aset harus profesional dan handal untuk mencegah penyelewengan yang dapat merugikan keuangan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung optimalisasi aset daerah secara efektif dan efisien. Hasil akhir optimalisasi aset adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai (Siregar, 2004). Panduan dalam pengelolaan aset daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah melakukan manajemen aset secara baik dan benar. Dalam manajemen aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan dan penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan sehingga arah pembangunan dapat terintegrasi dan terprogram dengan baik.

Aset tanah merupakan aset yang paling sulit dalam pengelolaannya. Hal ini karena tanah milik pemerintah memiliki banyak ragamnya dengan status penguasaan yang bermacam-macam pula sehingga terjadi banyak kepentingan terhadap tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah. Tanah merupakan aset daerah, khususnya aset tanah yang dioptimalkan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan daerah. Sebaliknya, aset daerah yang tidak dikelola dan dimanfaatkan secara optimal justru akan membebankan keuangan daerah, melebihi biaya pemeliharaan daerah atas aset yang tidak sebanding dengan keuntungan yang dapat dihasilkan. pemerintah perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan daerah yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan (Mardiasmo, 2004).

Pertanggungjawaban atas aset daerah menjadi sangat penting karena pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Tanah merupakan salah satu aset pemerintah yang sangat penting dan vital dalam menggerakkan roda pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peruntukan dari tanah milik Pemerintah Daerah digunakan untuk kepentingan umum. Aset milik daerah memiliki dua fungsi yaitu fungsi pelayanan dan fungsi budgeter. Fungsi pelayanan dari aset tanah digunakan untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan fungsi budgeter dapat menjadi sumber tambahan PAD melalui bentuk sewa, kerja sama, bangun guna serah dan sebagainya, seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 1 Data Aset Tetap (Tanah) Milik Pemerintah Kota Kupang Tahun 2019

Aset Tanah	Luas Tanah (m <sup>2</sup> )	Keterangan
Total Aset Tanah	37.244	-
Kosong Pemanfaatan	1.761	Kerjasama Pemanfaatan dan Kerjasama Pemanfaatan
Belum Dimanfaatkan	26.654	Disewakan dan Kerjasama Pemanfaatan
	10.090	Tidak ada kontribusi

Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas bahwa masih terdapat aset tanah yang belum dimanfaatkan dengan baik. Terdapat 10.058 m<sup>2</sup> yang belum dimanfaatkan dan memang sudah ada tanah yang dimanfaatkan tetapi tidak terdapat kontribusi biaya baik dari pemerintah maupun dari stakeholder.

Pengelolaan tanah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum, untuk pengaturan dan pengelolaan pertanahan tidak hanya untuk menciptakan ketertiban hukum, namun juga untuk menyelesaikan masalah sengketa dan konflik pertanahan yang timbul. Tujuan lain dari diselenggarakannya program pengelolaan pertanahan adalah untuk mewujudkan peraturan terkait dengan penyelenggaraan dan administrasi yang berkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan tanah yang akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Indonesia.

Menilik posisi strategis dari instrumen pengelolaan aset/barang milik daerah yang juga merupakan bagian dari pengelolaan

keuangan daerah, maka ada beberapa isu utama yang muncul ke permukaan yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan dan pengoptimalan penggunaan aset milik daerah agar berdaya dan berhasil guna. Isu-isu utama tersebut antara lain: tuntutan masyarakat agar pengelolaan aset/barang milik daerah baik aset/barang yang dikelola langsung maupun dipisahkan harus didasarkan pada kaidah mekanisme pasar *value for money* (efektif, efisien, dan ekonomis), transparansi, dan akuntabilitas, investor berkeinginan melakukan kerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya memberdayakan aset/barang milik daerah agar sama-sama dapat memberikan keuntungan, aset yang tidak termanfaatkan dioptimalkan untuk penggunaan yang lain, baik untuk kepentingan sosial kemasyarakatan maupun untuk kepentingan pengembangan ekonomi.

Pelaksanaan inventarisasi meliputi pendataan, kodifikasi, pengelompokan dan pembukuan/administrasi yang baik maka akan memberikan prediksi adanya tingkat optimalitas aset tetap (tanah dan bangunan) yang baik pula (Jusmin dan Nursalim, 2018). Penelitian ingin menguji kembali penelitian (Fajri dkk, 2018; Riyono, 2013; Nugroho, 2011) terkait pengelolaan aset.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Milik Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah di Kota Kupang".

## METODE PENELITIAN

Bagian Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kuantitatif deskriptif. Dilaksanakan di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, Jln. S.K. Lerik – Kelapa Lima – Kota Kupang – NTT, dengan objek penelitian Pemanfaatan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 yang meliputi optimalisasi pemanfaatan aset yang meliputi Pinjam Pakai, Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS)/ Bangun Serah Guna (BSG). Jenis data menggunakan data kualitatif berupa kuisisioner (Sugiyono, 2015) dan data kuantitatif berupa konfirmasi pemanfaatn aset yang tertera Kartu Inventaris Barang A (KIB A). sumber data primer didapatkan dari penyebaran kuisisioner yang diberikan kepada pegawai BKAD Kota Kupang, serta data sekunder bersumber dari buku-buku teks,

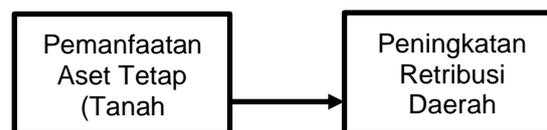
buku-buku teori, modul, hasil penelitian, jurnal ilmiah, arsip-arsip resmi dalam internal maupun eksternal Pemerintah Kota Kupang, terkait masalah dan tujuan penelitian: data pendapatan daerah dan data aset tanah diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang berupa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang serta Bagian Akuntansi dan Aset berupa buku Kartu Inventaris Barang (KIB A).

Populasi penelitian ini adalah pegawai BKAD yang berjumlah 233 pegawai. sampel penelitian berupa pegawai BKAD Bidang Aset sebanyak 16 pegawai atas pertimbangan atau kriteria dalam Purposive sampling adalah pegawai BKAD terkhususnya pegawai yang berhubungan langsung dengan proses pemanfaatan aset yaitu Kepala Bidang Akuntansi dan Aset, Kasubid pencatatan, Kasubid pelaporan, Kasubid pemanfaatan aset dan staff.

Kuesioner menggunakan skala pengukuran berupa skala likert dengan skor 1-4. Kuesioner diberikan kepada pegawai BKAD Kota Kupang terkhususnya pegawai BKAD di Bidang Aset sebanyak 16 kuesioner sesuai dengan jumlah pegawai pada bidang tersebut dengan jumlah 14 pertanyaan. Dan dari 16 kusioner yang dibagikan hanya 12 kusioner yang diisi

Diuji dengan analisis statistic deskriptif dengan uji Validitas dan Uji Reliabilitas, Model Regresi Linear Sederhana, Uji Parsial memakai Uji t. Koefisien regresi sederhana adalah sebagai berikut:  $RD = \alpha_0 + \alpha_1 OPA$

Keterangan: RD = Retribusi Daerah, OPA = Optimalisasi Pemanfaatan Aset,  $\alpha_0$  = angka konstan dari *Understandardized Coefficient*.  $\alpha_1$  = angka koefisien regresi. Berikut gambar kerangka berpikir penelitian ini:



Gambar1. Kerangka Berpikir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Tabel 2 menjelaskan bahwa pada variabel pemanfaatan aset jawaban minimum responden sebesar 18 dan maximum sebesar 32, dengan rata-rata total jawaban 26,00 dan standar deviasi sebesar 3,668. Dan pada variabel penerimaan retribusi daerah jawaban

minimum responden sebesar 17 dan maksimum sebesar 24, dengan rata-rata total jawaban 21,17 dan standar deviasi sebesar 3,186.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Dev.
Pemanfaatan Aset	12	18	32	26,00	3,668
Penerimaan Retribusi Daerah	12	17	24	21,17	3,186
Valid N (listwise)	12				

Uji validitas dan reliabilitas yang dilakukan terhadap 12 responden, diringkas dapat ditunjukkan pada tabel 3 dan 4. hasil dari uji validitas pada butir-butir pertanyaan Optimalisasi Pemanfaatan Aset memiliki nilai  $r_{hitung} \geq r_{tabel}$  pada  $n = 12 = 0,532$  sehingga seluruh butir pernyataan pada kategori optimalisasi pemanfaatan aset adalah valid. Dapat diketahui koefisien korelasi dari seluruh daftar pertanyaan kuesioner sebenarnya terdiri dari 8 pernyataan optimalisasi pemanfaatan aset dan 6 pernyataan penerimaan retribusi daerah. Namun dari 8 pernyataan optimalisasi pemanfaatan aset terdapat 1 pernyataan yang tidak valid, maka pernyataan tersebut harus dihilangkan sehingga tidak mempengaruhi pernyataan valid lainnya sedangkan untuk 6 pernyataan penerimaan retribusi daerah dinyatakan valid. Dari 14 pernyataan, terdapat 1 pernyataan yang tidak valid, karena nilai  $r_{hitung}$  lebih kecil dari  $r_{tabel}$  dan 13 pernyataan dinyatakan valid dengan nilai  $r_{hitung}$  lebih besar dari  $r_{tabel}$ , sehingga butir-butir pernyataan yang ada dalam kuesioner layak dan bisa dianalisis lebih lanjut.

Tabel 3. Hasil dari Uji Validitas

No	$r_{hitung}$	$r_{tabel}$	Ket
<b>Variabel X</b>			
1	0,658	0,532	Valid
2	0,558	0,532	Valid
3	0,698	0,532	Valid
4	0,554	0,532	Valid
5	0,658	0,532	Valid
6	0,637	0,532	Valid
7	0,716	0,532	Valid
<b>Variabel Y</b>			
1	0,85	0,532	Valid
2	0,759	0,532	Valid
3	0,850	0,532	Valid
4	0,851	0,532	Valid

5	0,889	0,532	Valid
6	0,943	0,532	Valid

Hasil uji reliabilitas (Tabel 4), variabel optimalisasi pemanfaatan aset memiliki nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,755 lebih besar dari 0,60. Hasil uji reliabilitas atas variabel penerimaan retribusi daerah menghasilkan nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,917 lebih besar dari 0,60. Hal ini berarti item-item kuesioner untuk mengukur variabel optimalisasi pemanfaatan aset dan penerimaan retribusi daerah dapat dikatakan konsisten atau reliabel sebagai alat ukur.

Tabel 4. Hasil dari Uji Reliabilitas Reliability Statistics Variabel X

Cronbach's Alpha	N of Items
,755	7
Reliability Statistics Variabel Y	
Cronbach's Alpha	N of Items
,917	6

Model Regresi Linier Sederhana untuk mengetahui pengaruh besarnya kontribusi hasil retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan analisis regresi linier, adapun hasil dari regresi linier tersebut adalah  $RD = \alpha_0 + \alpha_1 OPA$ . Dari hasil regresi linear sederhana pada tabel 5 persamaannya berubah menjadi sebagai berikut :  $RD = 7,288 + 0,534 RPKD$ .

Tabel 5. Regresi Linier Sederhana Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients B	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
(Const)	7,288		1,282	,229
OPA	,534	,217	2,463	,033

Koefisien regresi sebesar + 0,534, angka tersebut menggambarkan bahwa Optimalisasi Pemanfaatan Aset mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya Penerimaan Retribusi Daerah artinya apabila Pemerintah Kota Kupang melakukan Pemanfaatan Aset dengan optimal maka dapat meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 53,4%.

Berdasarkan tabel 5, hasil uji t (parsial) menunjukkan bahwa pengaruh optimalisasi pemanfaatan aset terhadap penerimaan Retribusi Daerah memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,463 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 1,812 atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  serta nilai signifikan dari optimalisasi pemanfaatan aset terhadap penerimaan retribusi daerah sebesar 0,033 < dari 0,05 sehingga hipotesis dapat diterima

atau signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Optimalisasi Pemanfaatan Aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah.

### Pembahasan

Pengaruh Optimalisasi Pemanfaatan Aset terhadap Penerimaan Retribusi Daerah, meliputi :

1. Hasil dari uji validitas menyatakan item-item dari pernyataan kuesioner dikatakan valid walaupun terdapat 1 item tidak valid, sehingga harus dihilangkan. Berdasarkan 1 item yang tidak valid tersebut berupa pemanfaatan aset pemerintah Kota Kupang tidak terdapat tahap pemanfaatan pinjam pakai terhadap aset tanah. Sedangkan hasil dari uji reliabilitas menyatakan secara keseluruhan bahwa item dari kuesioner reliable atau dapat dipercaya.
2. Hasil dari metode regresi linear sederhana menyatakan bahwa Optimalisasi Pemanfaatan Aset mempunyai pengaruh positif terhadap besarnya Penerimaan Retribusi Daerah artinya apabila Pemerintah Kota Kupang melakukan Pemanfaatan Aset dengan optimal maka dapat meningkatkan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar 53,4%.
3. Hasil dari Uji T menyatakan variabel optimalisasi pemanfaatan aset memiliki nilai t-hitung sebesar 2,463 > dari nilai t-tabel sebesar 1,812 dengan signifikansi sebesar 0,033 < dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa optimalisasi pemanfaatan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan retribusi daerah.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur pengaruh optimalisasi pemanfaatan aset terhadap penerimaan retribusi daerah memiliki pengaruh positif. Sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah terdapat tahap pemanfaatan aset berupa pinjam pakai, sewa, Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dan Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG), tahap pemanfaatan aset tersebut merupakan indikator-indikator yang diteliti. Berdasarkan hasil yang telah diteliti pemerintah Kota Kupang tidak melaksanakan seluruh indikator-indikator terkait dengan pemanfaatan aset. Indikator yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kupang yaitu pemanfaatan aset melalui sewa,

kerjasama pemanfaatan dan Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG). Walaupun hasil penelitian memberikan pengaruh positif, sebenarnya pemerintah kota kupang belum melakukan pengoptimalan pemanfaatan aset secara keseluruhan. Apabila pemerintah Kota Kupang melakukan pengoptimalan pemanfaatan aset secara keseluruhan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka pengaruh atau kontribusi dari pemanfaatan aset tanah bisa memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan retribusi daerah. Tetapi kenyataannya hasil dari penerimaan retribusi daerah masih sangat kecil dikarenakan untuk tanah penarikannya sangat kecil, karena aset tanah Pemerintah Kota Kupang digunakan untuk sarana dan prasarana kesejahteraan rakyat, bila dinilai dengan nominal memang kecil tetapi bila dinilai dari kesejahteraan masyarakat sangat besar karena pendapatan dan kesejahteraan rakyat bisa lebih meningkat dan terjamin. Hasil merupakan bagian utama artikel ilmiah yang berisi : hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, dapat dilengkapi dengan tabel atau grafik, untuk memperjelas hasil secara verbal.

### PENUTUP

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui pengaruh optimalisasi pemanfaatan aset terhadap peningkatan penerimaan retribusi daerah. Berdasarkan hasil analisa data regresi linier antara pemanfaatan aset dengan retribusi daerah di Kota Kupang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya optimalisasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan retribusi daerah. Walaupun hasil penelitian memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan retribusi daerah, sebenarnya pemerintah kota kupang belum melakukan pengoptimalan pemanfaatan aset secara keseluruhan. Pemanfaatan aset tetap khususnya tanah di kota Kupang tidak semua metode pemanfaatan dilaksanakan. Metode pemanfaatan yang digunakan hanya sewa, kerja sama pemanfaatan dan Bangun Guna Serah (BGS).

Hubungan antara pemanfaatan aset dan penerimaan retribusi daerah terdapat hubungan yang signifikan, yang berarti bahwa apabila pemerintah melakukan pengoptimalan pemanfaatan aset tanah maka penerimaan retribusi daerah juga meningkat meskipun memiliki kontribusi yang sangat kecil.

Disarankan Pemerintah Kota Kupang diharapkan lebih memperhatikan proses pengoptimalan pemanfaatan Aset Daerah sehingga dari sektor pengelolaan aset daerah bisa memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal pengoperasionalan variabel karena hanya mempertimbangkan faktor utama, yaitu optimalisasi pemanfaatan aset sebagai salah satu faktor peningkatan penerimaan retribusi daerah. Pemilihan faktor utama ini secara riil didasarkan pada pertimbangan kesesuaian variabel dengan kasus-kasus yang terjadi pada lokasi penelitian dan berdasarkan hasil penelitian memang terbukti optimalisasi pemanfaatan aset berpengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan retribusi daerah. Diharapkan kepada penelitian selanjutnya dapat mengoperasionalkan faktor lain yang juga berpotensi memiliki peran terhadap penerimaan retribusi daerah. Selain itu, penggunaan kuesioner rentan terhadap bias-bias respon sehingga perlu dilakukan peningkatan kualitas metodologi penelitian, misalnya melalui kombinasi desain penelitian survei dan wawancara terstruktur. Segingga diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperhatikan kualitas metode penelitian.

2001–2010 (Doctoral dissertation, Sebelas Maret University).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Siregar, Doli D. 2004. *Manajemen Aset*, Jakarta; Gramedia Pustaka Utama.

Riyono, Sugeng. 2013. *Pemanfaatan Aset Daerah (Studi tentang pola kemitraan asset tanah Pemerintah Provinsi Jawa Timur)*. *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 11, No. 2.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-undang Nomor. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

Fajri, A., Djalaluddin, A., & Siswanto, S. (2018). Pengelolaan aset tanah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Malang perspektif Ekonomi Islam. *Islamic Economics Quotient: Journal of Economics & Business Sharia*, 1.

Jusmin, Nursalim. (2018). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Tingkat Optimalitas Aset Tetap (Tanah dan Bangunan) Pemerintah Kabupaten Sorong. *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 6(2), 139-147.  
<http://doi.org/10.25273/equilibrium.v6i2.2933>

Mardiasmo, 2004, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi 2, Yogyakarta; Andi,

Nugroho. (2011). Analisis pengelolaan aset tanah dan bangunan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Madiun Tahun Anggaran